



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
HALMAHERA BARAT TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN JAWABAN
TERMOHON, KETERANGAN BAWASLU, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, PENGESAHAN ALAT BUKTI)
(II)**

JAKARTA,

JUMAT, 5 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Halmahera Barat Tahun 2020

PEMOHON

Danny Missy, Imran Lolory

TERMOHON

KPU Kabupaten Halmahera Halmahera Barat

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, Pengesahan Alat Bukti) (II)

Jumat, 5 Februari 2021, Pukul 08.02 WIB – 08.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Achmad Dodi Haryadi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 108/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Roy Valiant Sembiring
2. Samuel David

B. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 108/PHP.BUP-XIX/2021:

Hendra Kasim

C. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 108/PHPU.BUP-XIX/2021:

1. AH. Wakil Kamal
2. Freizer Giwe

D. Termohon:

1. Miftahuddin Yusup (KPU Halmahera Barat)
2. Marks Kurang (KPU Halmahera Barat)
3. Ramlah Hasyim (KPU Halmahera Barat)

E. Bawaslu:

1. Alwi Ahmad (Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat)
2. Aknosius Datang (Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat)
3. Muhammad Hi. Adam (Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat)

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.02 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Bismillahirrahmaanirrahiim, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 108/PHP.BUP-XIX/2021 Halmahera Barat. Dengan agenda penyampaian jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, dan penegasan alat bukti Para Pihak. Sebelumnya dipersilakan Pemohon memperkenalkan siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL DAVID

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, perkenalkan, kami dari Kuasa Hukum Pemohon, saya Samuel David, sebelah kanan saya Roy Valiant Sembiring, Yang Mulia, terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Suaranya kok kecil sekali? Ulang, ya? Deketin (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL DAVID

Baik, mohon izin, Yang Mulia, kami dari Kuasa Hukum Pemohon, nama saya Samuel David, dan sebelah kanan saya Roy Valiant Sembiring, Yang Mulia, terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

4. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih. Termohon silakan!

5. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Hukum Termohon yang hadir, Hendra Kasim, Yang Mulia, prinsipal kami yang hadir di ruang sidang yang kami muliakan ini, Ketua KPU Halmahera Barat Miftahuddin Yusup.

Yang mengikuti sidang yang mulia ini melalui daring, Kuasa Hukum Halmahera Barat Marks Kurang dan Kordiv Parmas KPU Halmahera Barat Ibu Ramlah Hasyim. Terima kasih, Yang Mulia.

6. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, Pihak Terkait!

7. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: FREIZER GIWE

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Terkait pada hari ini diwakili oleh Bapak Ahmad Wakil Kamal S.H., M.H., dan saya sendiri Freizer Giwe S.H., M.H., terima kasih, Yang Mulia.

8. KETUA: ANWAR USMAN

Ya baik, Bawaslu?

9. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA BARAT: ALWI AHMAD

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bawaslu sendiri yang hadir, Ketua dan Anggota saya sendiri Alwi Ahmad dan Pak Aknosius Datang yang hadir pada saat ini, dan mengikuti daring adalah Pak Muhammad Hi. Adam di Bawaslu RI. Demikian, Yang Mulia.

10. KETUA: ANWAR USMAN

Ya baik. Langsung ke Termohon, silakan menyampaikan pokok-pokok permohonannya, waktu 10 menit!

11. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami menyampaikan jawaban atau tanggapan Termohon atas permohonan Pemohon dalam Per Perkara Nomor 108/PHP.BUP-XIX/2021 karena keterbatasan waktu, maka kami hanya akan menyampaikan pokok-pokok jawaban kami. Adapun yang tidak disampaikan bukan berarti tidak kami tanggapi karena secara tegas telah kami jawab dalam jawaban yang telah kami serahkan, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebelumnya, kalau ada renvoi ... lebih awal, ya?

13. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Siap, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itupun hanya typo saja renvoinya.

15. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, Yang Mulia, siap. Ada renvoi 2, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Halaman berapa?

17. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Baik, Yang Mulia. Halaman 6, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Halaman 6?

19. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Angka 5 baris ke-2 (...)

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Halaman 6 (...)

21. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Halaman 6, Yang Mulia, angka 5 baris ke-2.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Angka 5 baris ke-2, ya?

23. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, di situ disebutkan diikuti oleh 3 pasangan calon, kami ubah menjadi 4, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

4, ya?

25. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Yang berikut renvoi yang terakhir halaman 57, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Halaman?

27. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

57.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

57.

29. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Kata dapat pada pojok kanan atas kami hapus, Yang Mulia.
Terima kasih, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oke, ya lanjut ya 10 menit, ya?

31. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Perkara Nomor 108/PHP.BUP-XIX/2021, izinkan saya

sebagai Kuasa Hukum Termohon menyampaikan jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 108/PHP.BUP-XIX/2021.

Dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa pada pokoknya, Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah karena partisipasi pemilih DPTb, bukan berkaitan dengan selisih suara. Bahwa desain penyelesaian sengketa pemilihan oleh electoral justice system telah mengatur jenis sengketa dan pelanggaran pemilihan dengan kanal penyelesaian kompetensi lembaga yang berwenang.

Bahwa materi permohonan Pemohon lebih mengandung unsur sengketa proses dan dugaan pelanggaran administrasi. Oleh sebab itu, berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, lembaga yang berwenang menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran tersebut bukan Mahkamah Yang Mulia, melainkan Bawaslu untuk sengketa proses dan dugaan pelanggaran administrasi.

Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar.

Bahwa dalam petitumnya, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 6 Tahun 2020 yang pada pokoknya mengatur bahwa petitum memuat permintaan untuk membatalkan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dalam menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam permohonannya, petitum Pemohon hanya memuat permintaan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 8 PMK 6 Tahun 2020 sehingga tidak diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Oleh karenanya, permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Kedudukan hukum Pemohon.

Berdasarkan DAK-2 Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Barat adalah=135.859 jiwa. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan, Pemohon baru memiliki legal standing mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan jika terdapat paling banyak ... terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% suara dari total suara hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 136 /HK.03.1-Kpt/8201/KPU-Kab/XII/2020 jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 adalah=66.589 suara. Sehingga batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 66.589$ dari jumlah suara sah adalah=1.332.

Bahwa perolehan su ... perolehan suara Pemohon adalah 21.074 suara sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara=22.524 suara. Sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah=14.050 suara. Melebihi batas maksimal perbedaan perolehan

suara yaitu 1.332 suara. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Permohonan Pemohon tidak jelas.

Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf d angka 4 PMK 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon ternyata dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara. Sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, obscur libel.

Posita petitum tidak sejalan.

Bahwa dalil permohonan halaman 27 huruf a mendalilkan mengenai pemilih DPTb pada Desa Sidangoli Dehe di TPS 4. Sedangkan pada petitum Pemohon tidak meminta PSU pada TPS 4 Sidangoli Dehe meminta PSU pada TPS 1 Sidangoli Dehe.

Bahwa permohonan Pemohon pada halaman 38 angka 17, Pemohon mendalilkan terjadi dugaan pelanggaran pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Buo serta TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Kedi. Akan tetapi pada petitum Pemohon tidak diminta untuk dilakukan se ... dilakukan PSU pada TPS 1, TPS 2 Desa Buo serta TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Kedi. Bahwa ketidaksesuaian antar posita dan petitum berdampak pada permohonan yang kabur dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum permohonan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan a quo kecuali apa yang dengan tegas dan bulat Termohon dalam jawaban Termohon ini. Bahwa sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incumbit probatio* atau beban pembukti ... siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggung jawab Pemohon untuk membuktikan. Atau dengan kata lain, baban pembuktian berada di pundak Pemohon. Maka Pemohon harus membuktikan di hadapan Mahkamah yang Mulia bagaimana, kapan, dan dimana Termohon memobilisasi dan mengarahkan pemilih DPTb untuk mendukung Pihak Terkait.

Bahwa pemo ... permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat TSM yang dilakukan oleh pihak penyelenggara di tingkat TPS yang tersebar di semua TPS di 7 kecamatan, di Kabupaten Halmahera Barat adalah dalil permohonan yang tidak benar dan tidak berlandaskan hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan pemilihan DPTb merupakan pemilihan siluman yang dimobilisasi oleh Termohon untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebuah asumsi yang tidak benar.

Bahwa secara filosofis, pemilih tambahan atau pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan adalah yang dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.

Bahwa faktanya adalah Termohon tidak mobilisasi maupun mengerahkan 1 orang pun dalam menentukan pilihan serta tidak ser ... tidak ada 1 orang pun yang mengetahui pemilihan DPTb dan menentukan pilihan kepada pasangan calon yang mana. Karena demikianlah asas rahasia dalam pemilihan dan mana tidak satu orang pun mengetahui pilihan yang ditentukan oleh pemilih.

Bahwa Pemohon merupakan calon incumben yang memiliki hubungan langsung dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat yang berwenang melakukan perekaaman KTP elektronik, sehingga yang mungkin melakukan mobilisasi maupun berhak mengerahkan pemilih yang memiliki KTP elektronik atau surat keterangan adalah Pemohon sendiri.

Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, hadirin yang mengikuti persidangan yang mulia ini, baik melalui luring maupun daring. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan dalil yang serupa mengenai pemilih tambahan pada 7 kecamatan, 54 TPS se-Kabupaten Halmahera Barat yaitu terdiri dari Kecamatan Jailolo sebanyak 31 TPS, Kecamatan Jailolo Selatan sebanyak 8 TPS, kenyo ... Kecamatan Ibu Utara sebanyak 3 TPS, Kecamatan Ibu sebanyak 2 TPS, Kecamatan Ibu Selatan sebanyak 2 TPS, Kecamatan Sahu sebanyak 2 TPS, Kecamatan Loloda sebanyak 6 ... 6 TPS. Karena keterbatasan waktu, Termohon tidak menyampaikan secara lisan untuk seluruh TPS, ya Majelis, mohon kami menyampaikan untuk TPS-TPS yang disebutkan secara rigit nama-nama pemilih oleh Pemohon.

Bahwa TPS 4 Desa Soakonora yang didalilkan oleh Pemohon. Selain mengenai DPTb, Pemohon juga menyebutkan nama pemilih yang menurut Pemohon bukan warga Halmahera Barat namun menggunakan hak pilih. Bahwa pada halaman 13 masih pada TPS 4 Soakonora, Pemohon juga mendalilkan terdapat penduduk di luar Halmahera Barat untuk mendukung Pihak Terkait dengan identitas pemilih sebagai berikut.

Ada 5 orang Namanya disebutkan, Majelis. Vera Risakota, NIK dianggap dibacakan. Samsia Mukaram, NIK dianggap dibacakan. Fesdiana Pikiran, NIK dianggap dibacakan. Drs. Corneles Muluwerel, NIK dianggap dibacakan. Ester Lahimade Nomor Induk Kependudukan dianggap dibacakan, adalah dalil Pemohon yang tidak benar.

Bahwa pemilih atas nama sebagaimana yang disebutkan oleh Termohon tadi, telah kami buktikan dalam bukti T-14 dan bukti T-5 bahwa pemilih-pemilih tersebut adalah penduduk Halmahera Barat.

Sehingga elemen data pemilih baik NIK, alamat dan lain sebagainya mohon dianggap dibacakan, Majelis.

Bahwa permohonan halaman 31 huruf F Desa Sidangoli Gam, khususnya TPS 7, Pemohon mendalilkan terdapat 7 orang pemilih yang bukan penduduk Halmahera Barat. Yaitu 4 orang ber-KTP Manado, atas nama Yulit Salu, Ariani Nasadie, Vhilly Veronica, Aprilia Sarendeng. 1 orang ber-KTP Ternate atas nama Ratmi Do Dasim. 1 orang ber-KTP Minahasa Utara atas nama Novita Adilang, dan 1 orang ber-KTP Seram Bagian Timur atas nama Sheila Manua, adalah dalil yang tidak benar. Bahwa pada TPS 7 Sidangoli Gam, tidak ada pemilih tambahan dan pemilih pindahan. Sedangkan nama-nama pemilih sebagaimana disebutkan tadi, tidak terdaftar dalam DPT 7 Sidangoli Gam. Dengan demikian, tidak mungkin ada pemilih sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam dalil Pemohon tersebut di atas yang menggunakan hak pilih.

Bahwa permohonan juga mendalilkan terhadap pelanggaran berkaitan dengan pemilih DPTb tersebut, Pemohon mengajukan keberatan dan meminta untuk membuka kotak suara untuk memastikan kebenaran data berdasarkan formulir daftar hadir pemilih, daftar hadir pemilih pindahan, dan daftar hadir pemilih tambahan adalah pemilih siluman yang dimobilisir dan diarahkan oleh Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait. Bahwa tidak ada yang mengetahui pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih DPPH, mendukung pasangan calon nomor urut berapa ...

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Waktunya masih 3 menit, ya.

33. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Siap, Yang Mulia. Demikian asas rahasia dan penyelenggaraan pemilu.

Bahwa adapun permintaan Pemohon untuk membuka kotak suara pada saat rekapitulasi tidak dipenuhi oleh Termohon adalah berkaitan dengan mekanisme atau prosedur rekapitulasi. Itu diatur dalam Pasal 15 PKPU 19, untuk verifikasi di tingkat kecamatan dan untuk kabupaten diatur dalam Pasal 29 PKPU 19 2020. Ini mohon dianggap dibacakan, Majelis, karena keterbatasan waktu.

Bahwa Pemohon ... permohonan halaman 39 angkat 18. Pemohon mengutip Pasal 20 ayat (1) PKPU 8 Tahun 2018 yaitu Pasal 6 PKPU 18 Tahun 2020. Untuk itu menjelaskan bahwa surat suara cadangan digunakan untuk pemilih DPTb, sehingga tidak mungkin pemilih tambahan sebanyak itu adalah selain dalil yang tidak benar juga

merupakan logika hukum yang keliru legal policy. Bahwa Pasal 87 PKPU 8 2018 mohon anggap dibacakan bunyinya, Majelis. Bahwa berdasarkan ranah hukum pemilihan sebagaimana disebutkan tadi, dikatakan bahwa surat suara yang digunakan adalah surat suara cadangan. Jika surat suara cadangan tidak cukup maka menggunakan surat suara yang masih tersisa, dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Termohon sudah benar sesuai dengan ranah hukum pemilihan.

Bahwa total pemilihan DPTb dari 7 kecamatan yang didalilkan Pemohon adalah sebanyak 981 pemilih. Sementara itu selisih suara antar Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 1.450 suara. Maka dalil Pemohon yang menyebutkan selisih suara antar Pemohon dengan Pihak Terkait adalah karena pemilih DPTb, tidak benar karena jumlah pemilih DPTb tidak lebih besar dari selisih suara antar Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kami uraikan di dalam tabel 108, Majelis. Mohon anggap dibacakan. Disitu juga kami menguraikan bahwa TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon ternyata justru Pemohon juga meraih suara terbanyak di beberapa TPS, termasuk pula Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Calon Nomor 4. Sehingga dengan demikian, dalil Pemohon bahwa DPTb mempengaruhi perolehan suara ... perolehan suara pasangan calon adalah tidak benar, Majelis.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon, mengabulkan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 136 dst.

Menetapkan pemilihan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat tahun 2020 yang benar adalah;

Pasangan Calon Nomor Urut 1=22.524.

Pasangan Calon Nomor Urut 2=21.074.

Pasangan Calon Nomor Urut 3=12.824.

Pasangan Calon Nomor Urut 4=10.167.

Total suara sah=66.586.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Hormat kami Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Lanjut ke Pihak Terkait, ya. Waktunya juga sama, 10 menit. Nanti pokok-pokoknya saja disampaikan. Kalau ada renvoi, silakan disampaikan terlebih dahulu! Untuk yang typo saja.

35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: AH. WAKIL KAMAL

Iya, Yang Mulia. Hanya ada 1, halaman 15, Alinea paling atas garis ... baris kedua, Yang Mulia. Tidak ada laporan, laporannya dihapus, Yang Mulia. Itu aja, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, oke. Ya, silakan!

37. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: AH. WAKIL KAMAL

Perkara Nomor 108/PHP.BUP-XIX/2021, Pihak Terkait atas nama James Uang, S.Pd, M.M, dan Djufri Muhammad, Pasangan Nomor Urut 1, menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat tahun 2020, dengan alasan. Bahwa penduduk Halmahera Barat adalah 135.859 suara ... 859 or ... penduduk. Sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2%.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sama ya mengenai uraian dengan Termohon?

39. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: AH. WAKIL KAMAL

Ya.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dilanjut yang lain saja.

41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: AH. WAKIL KAMAL

Langsung saja, Yang Mulia. Bahwa selisihnya antara Pemohon seharusnya 2% itu adalah 1.332 suara, ternyata selisihnya lebih dari 2% karena 1.450 suara. Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo karena berdasarkan ... oleh karenanya berdasarkan asas-asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan.

Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam perkara a quo, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mempersoalkan selisih perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon karena memang rekapitulasi perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon telah benar dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Langsung pada halaman 6, Yang Mulia. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya kecurangan dan pelanggaran berupa mobilisasi pemilih siluman di 7 kecamatan se-Kabupaten Halmahera Barat. Atas dalil-dalil tersebut, Pihak Terkait memberikan tanggapan dan bantahan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 dan Pasal 37 PKPU Nomor 8 Tahun 2008 pada pokoknya menjelaskan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan KTP-el atau surat keterangan untuk mencoblos di TPS 1 jam sebelum waktu pemungutan suara di TPS berakhir dari pukul 12.00-13.00.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci adanya dugaan pelanggaran penggunaan hak pilih berdasarkan DPTb tersebut, siapa, di mana, dan bagaimana cara penyalahgunaan KTP-el suket tersebut, serta menguntungkan siapa seandainya ada yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan KTP-el suket tersebut. Selain itu, tidak dapat dipastikan juga dugaan penyalahgunaan KTP-el suket tersebut akan memilih Pemohon, Pihak Terkait atau 2 pasangan calon lain. Justru Terkait berpendapat bahwa Pemohonlah yang jauh berpotensi melakukan mobilisasi pemilih menggunakan KTP-el Suket karena Pemohon sebagai petahana Bupati Kabupaten Halmahera Barat mempunyai kewenangan untuk memerintahkan dinas terkait termasuk menerbitkan suket baru untuk digunakan dan dimobilisasi menjelang hari pencoblosan.

Bahwa lagipula di TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon proses pencoblosan dan rekapitulasi suara berlangsung secara tertib, damai, aman, dan tidak ada keberatan atau protes atau catatan dari saksi-saksi pasangan calon dalam Form C.Hasil. Serta saksi-saksi

pasangan calon juga menandatangani Form C.Hasil tersebut. Selain itu, juga tidak ada laporan, temuan, atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon.

Kemudian, di Kecamatan Jailolo, Yang Mulia.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, permohonan Pemohon dalam halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan di TPS 1 Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo tersebut pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb, akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 43 pemilih siluman serta mencoblos ... pencoblosan yang dilakukan antara jam 12.00-13.00. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada, dan hanya asumsi belaka karena Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut.

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00-13.00 waktu setempat. Terhadap 43 pemilih dalam DPTb adalah pemilih yang terdaftar sebagaimana Form C.Hasil Salinan-KWK, bukan pemilih siluman sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Pemilih dalam DPTb di TPS 1 Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau surat keterangan. Di TPS 1 Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka pemilih DPTb wajib diberi hak untuk memilih.

Pemilih DPTb di TPS 1 Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 pasangan calon lain. Saksi Pemohon di TPS 1 Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat seluruhnya menandatangani dokumen C.Hasil serta tidak ada mengajukan keberatan. Selain itu, juga tidak ada laporan, temuan, atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon.

Halaman 14, Yang Mulia, yang lain dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 12 pada pokok permohonannya menyatakan di TPS 4 Desa Soakonora, Kecamatan Jailolo terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb, akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat di DPTb sebanyak 40 pemilih siluman. Serta mencoblos ... pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00-13.00, serta adanya pemilih yang bukan warga Desa Soakonara Kecamatan Jailolo bernama Samsiah Mukaram, Drs. Corneles Maluwerel, serta Ester Lahimade.

Bahwa dalil yang sebagai Pemohon adalah permohonan adalah tidak benar, keliru. Di ... di TPS 4 Desa Soakonora, jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP surat keterangan DPTb adalah 39 orang dan bukan 40 orang. Vide Form C.Hasil Salinan-KWK. Pemilih dalam DPTb di TPS 4 Desa Soakonora Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Soakonora, Kecamatan Jailolo

yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP dan surat keterangan ... surat keterangan.

Pemilih dalam DPTb di TPS 4 Desa Soakonara, Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 pasangan la ... atau 2 pasangan calon lain. Saksi Pemohon di TPS 4 Desa Soakonara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halairat ... Halmahera Barat menandatangani dokumen C.Hasil serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula, tidak ada temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Pemohon.

Yang lain dianggap dibacakan, Yang Mulia. Lanjut ke halaman 27, poin 42.

Di TPS 02 Desa Pornity, Kecamatan Jailolo, juga demikian. Pemohon mendalilkan adanya pem ... pemilih siluman. Tapi, ternyata, Yang Mulia, pemenang peraih suara terbanyak adalah Pemohon sendiri. Yaitu, mendapatkan 129 suara. Di sini juga tidak ada keberatan, seluruh pasa ... seluruh saksi pasangan calon menandatangani dan tidak ada temuan atau laporan maupun rekomendasi Bawaslu terhadap dalil-dalil.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Waktunya masih 2 menit, ya.

43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 108: AH. WAKIL KAMAL

Ya. Tinggal 2 menit, Yang Mulia.

Yang terakhir, Yang Mulia, halaman 47.

Demikian juga, di TPS 4 Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan, terdapat pemilih tambahan yang dinyatakan sebanyak 18 pemilih siluman. Itu dalil Pemohon adalah tidak benar, Yang Mulia. Karena, justru pemenang ... pemenang di TPS tersebut adalah, peraih suara terbanyak adalah Nomor Urut 02, Pemohon. Bahkan menang mutlak, ya, Yang Mulia. Dan di TPS ini juga tidak ada keberatan. Saksi pasangan calon juga semuanya tanda tangan, tidak ada temuan, tidak ada rekomendasi Bawaslu. Saya kira, yang lain dianggap dibacakan, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 108: AH. WAKIL KAMAL

Langsung pada petitum.

Bedasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Sebelum ke Bawaslu, saya hanya ingatkan. Bahwa, jika ada bukti tambahan, disegerakan sekarang. Disiapkan, ya. Supaya bisa diverifikasi dan disahkan. Jadi tidak bisa, kemudian di luar persidangan. Disiapkan, ya. Silakan sekarang Bawaslu. Ya, waktunya juga sama 10 menit, ya. Pokok-pokoknya saja yang disampaikan.

47. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA BARAT: AKNOSIUS DATANG

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Terhadap permohonan Danny Missy dan Imran Lolory dengan Nomor Perkara 108 sekian-sekian, perkenankan Ketua dan Anggota Majelis Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menyampaikan keterangannya sebagai berikut:

a. Keterangan atas pokok permohonan.

Bahwa, pada pokok permohonan Termohon pada angka 1 yang menguraikan terkait hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat. Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan sebagai berikut. Bahwa, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat pada pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 di 305 TPS se-Kabupaten Halmahera Barat yang melibatkan personil sebanyak 305 personil pengawas tempat pemungutan suara atau TPS, 169 orang panitia pengawas lapangan atau PPL, 24 orang pengawas kecamatan atau panwascam, dan pembentukan tim khusus pada wilayah 6 desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Bukti PK-01. Bahwa, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

tahun 2020. Tertanggal 15 sampai 17 Desember tahun 2020 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tidak ditemukan adanya laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran, bukti PK-02.

Bahwa, berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, pada rekapitulasi dan hasil penghitungan dan perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 yang dimulai sejak tanggal 16 Desember sampai dengan 17 Desember 2020 berjalan dengan lancar sampai pada penetapan dengan Nomor Penetapan 136/HK sekian-sekian tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat tahun 2020. Bukti PK-03. Selanjutnya, rekapitulasi suara dianggap dibacakan.

2. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon pada angka 6 menguraikan terkait selisih perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 James Uang dan Djufri Muhammad yang memperoleh suara terbanyak sebanyak ... disebabkan oleh terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat TSM yang dilakukan oleh pihak penyeleng ... penyelenggara tingkat TPS yang tersebar di TPS 8 Kecamatan, Kabupaten Halmahera Barat. Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 14 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota yang terjadi secara TSM, sehingga kewenangan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara TSM berada pada Bawaslu Provinsi ataupun ... adapun kewenangan Bawaslu kabupaten/kota dalam penanganan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah menerima laporan dan meneruskan laporan dimaksud kepada Bawaslu provinsi.

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi TSM telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara tanggal 21 Desember 2020 dengan Nomor Laporan 02/PL/TSM sekian-sekian Tahun 2020. Selanjutnya berdasarkan analisis hukum terkait syarat formil dan materiil, Bawaslu Provinsi Maluku Utara memutuskan tidak memenuhi syarat formil karena telah melampaui batas penyampaian laporan.

Bahwa berdasarkan putusan tersebut, Pemohon menyampaikan keberatan terhadap putusan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui laporan kepada Bawaslu Republik Indonesia tanggal 30 Desember 2020 dan diregistrasi dengan Nomor 05/sekian-sekian Tahun 2021, tang ... dan diregister tanggal 4 Januari 2021. Selanjutnya Bawaslu Republik Indonesia memutuskan menolak laporan keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Bukti PK-5.

3. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pada angka 7 yang menerangkan mobilisasi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan selaku penyelenggara membiarkan pemilih melakukan pencoblosan di TPS-TPS. Dimana pemilih-pemilih tersebut tercatat sebagai pemilih, pemilih tambahan atau DPTb. Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima laporan Pemohon atau masyarakat terkait adanya peristiwa mobilisasi pemilih.

4. Pada pokok permohonan Pemohon pas ... pada angka 9 menguraikan terkait dugaan pelanggaran berupa mobilisasi pemilih berdasarkan DPTb di Kecamatan Jailolo pada 31 TPS. Bawaslu kabupaten menerangkan sebagai berikut.

Untuk TPS 1 Desa Gumaharete, dianggap dibacakan. Untuk TPS Desa Suakonora, dianggap dibacakan. TPS Desa Gufasa, dianggap dibacakan.

Jadi, untuk 31 TPS di Kecamatan Jailolo dianggap dibacakan. Kita lanjut. Izin, Majelis, pada halaman 31 poin 5.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, lanjut!

49. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA BARAT: AKNOSIUS DATANG

Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon angka 10 yang menerangkan tentang keberatan saksi Pemohon yang di tuangkan pada Form Model D.Kejadian Khusus pada Pleno Tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Kecamatan Jailolo terhadap tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Jailolo terdapat keberatan saksi paslon terkait dengan DPTb pada TPS 1 Desa Tedeng, TPS 1 dan TPS 3 Desa Gamlamo, TPS 4 Desa Bobanehena, TPS 3 Desa Guaimaadu, TPS 1 dan 3 ... TPS 1, TPS 3, dan TPS 4 Desa Jalan Baru.

Bahwa setelah melakukan perbaikan dan pembacaan Model C1.Hasil-KWK dari Ketua PPS Kecamatan Jailolo dilanjutkan dengan penyerahan Model D.Hasil-KWK oleh KPK ... oleh PPK kepada saksi dan panitia pengawas Kecamatan Jailolo, vide Bukti PK-08.

Lanjut pada poin 6. Pada pokok permohonan pada angka 11 yang menguraikan terkait dugaan pelanggaran di Kecamatan Jailolo Selatan, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan sebagai berikut.

Desa Sidongoli Dehe. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas lapangan Desa Sidongoli Dehe terhadap tahapan pemungutan surat suara di TPS 04 Desa Sidongoli Dehe. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan ... tidak menemukan temuan atau menerima laporan Pemohon atau masyarakat terkait dengan 12 orang pemilih yang menggunakan e-KTP atau suket yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Bukti PK-56.

Untuk TPS 2 Desa Dodinga, dianggap dibacakan. TPS Rioribati, dianggap dibacakan. Desa Bangkit Rahmat, dianggap dibacakan. Desa Domato, dianggap dibacakan, Desa Sidangoli Gam, dianggap dibacakan.

Kita lanjut di halaman 37, poin 7. Pada pokok permohonan Pemohon pada angka 12 yang menguraikan terkait dugaan pelanggaran berupa mobilisasi pemilih berdasarkan DPTb pada Desa Duono, Desa Togereba Tua. Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menrangkan sebagai berikut.

Desa duono.

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas lapangan Desa Duono terhadap tahapan pemungutan suara di TPS 1 Desa Duono, ba ... Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima laporan Pemohon atau masyarakat terkait adanya 10 orang pemilih yang menggunakan e-KTP atau suket yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, Bukti PK-72. Untuk TPS 26, dianggap dibacakan. Desa Togoreba Tua, dianggap dibacakan.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, waktunya tinggal 2 menit, ya?

51. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA BARAT: AKNOSIUS DATANG

Kita lanjut ... yang lain dianggap dibacakan. Kita lanjut pada halaman 49, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

53. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA BARAT: AKNOSIUS DATANG

Keterangan tambahan di luar pokok permohonan hasil pengawasan terkait pemungutan dan penghitungan, serta rekapitulasi suara.

a. Pemungutan dan penghitungan.

Bahwa berdasarkan Formulir A pengawasan pengawas lapangan Desa Moiso tertanggal 9 Desember 2020, telah terjadi pencoblosan lebih dari satu kali yang diduga difasilitasi oleh Ketua KPPS TPS 2, desa Moiso. Berdasarkan hasil penelitian pemeriksaan pemungutan suara TPS 2 Desa Moiso, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat Melalui Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten mengeluarkan surat rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 2 dengan Nomor TU 00 sekian-sekian, tertanggal 11 Desember 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat.

Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, KPU Kabupaten Halmahera Barat menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melakukan pemilihan suara ulang pada tanggal 13 Desember. Tabel perbandingan hasil sebelum dan sesudah PSU di TPS 2 Desa Moiso.

Untuk perolehan suara sebelum PSU, Paslon Nomor Urut 1, James Uang dan Jufri Muhammad memperoleh=70 suara, sementara setelah PSU=64 suara.

Bahwa Dany Missy-Imran Lolory sebelum PSU=138, setelah PSU=127. +

Ahmad Zakir Mando-Alpinus K. Pay sebelum PSU=43 suara, setelah PS ... sesudah PSU=21 surat ... 21 suara.

Untuk Paslon Nomor Urut 4 Denny Palar dan Pak Iksan Hi Husain sebelum PSU=5 suara, sesudah PSU=0 suara.

b. Rekapitulasi.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara ... kemudain bahwa (...)

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, dianggap dibacakan saja itu.

55. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA BARAT: AKNOSIUS DATANG

Ya, dianggap dibacakan.

Penutup, demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat ini dibuat dengan sebenarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui

dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat. Hormat kami, Alwi Ahmad, Muhammad Hi. Adam, Aknosius Datang.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya baik. Sebelum pengesahan bukti, saya akan klarifikasi beberapa hal, ya? Pertama, kepada Pemohon dulu. Pemohon ini memang kuasanya tidak ditandatangani ya, beberapa peme ... apa ... penerima kuasa?

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL DAVID

Siap izin, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL DAVID

Ya betul, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, harus ditandatangani semua kalau ini, ya?

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL DAVID

Ya, Yang Mulia, ada kendala karena tidak bisa ke Jakarta, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau tidak ... tidak, ya didepannya dikurangi, jangan sebagaimana yang ada dalam tanda tangan di sini, ya?

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL DAVID

Siap, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Diperbaiki! Jadi, antara siapa yang kemudian di bawah ini ... apa namanya ... menerima kuasa dengan kemudian tanda tangan sama. Begitu, ya?

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL DAVID

Siap, Yang Mulia ... siap, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau dalam permohonan memang tidak semua, tidak apa-apa. Tetapi, yang tanda tangan ini harus semua.

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL DAVID

Siap, Yang Mulia, nanti dilengkapi, Yang Mulia (...)

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, sesuai dengan nama-nama di sini. Jadi sama, jadi sinkron, ya?

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL DAVID

Siap, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Untuk kuasa, tolong diperbaiki nanti, ya?

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL DAVID

Siap, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian yang berikutnya. Ini saya pertama harus konfirmasi soal penetapan hasil rekapitulasi, ya? Silakan nanti bisa dijawab juga langsung oleh Termohon terutama pada KPU, komisioner KPU, ya? Kapan itu ditetapkan hasil rekapitulasinya?

**73. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021:
MIFTAHUDDIN YUSUP**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pada tanggal 17 Desember 2020.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

17 Desember?

**75. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021:
MIFTAHUDDIN YUSUP**

2020.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jam?

**77. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021:
MIFTAHUDDIN YUSUP**

Pukul 00.49 WIT

78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pukul 00.49 WIT?

**79. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021:
MIFTAHUDDIN YUSUP**

WIT.

80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini dihadiri semua?

**81. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021:
MIFTAHUDDIN YUSUP**

Ya.

82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dihadiri semua paslon, kemudian ada saksinya juga?

**83. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021:
MIFTAHUDDIN YUSUP**

Ya dari saksi, paslon perwakilan saksi, terus dari komisioner semua hadir, dari Bawaslu juga hadir.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terbuka semua, ya?

**85. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021:
MIFTAHUDDIN YUSUP**

Ya.

86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tanda tangan semua?

**87. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021:
MIFTAHUDDIN YUSUP**

Paslon Nomor Urut (...)

88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pemohon?

**89. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021:
MIFTAHUDDIN YUSUP**

Ya, Pemohon tidak mendandatangani (...)

90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak tanda tangan (...)

**91. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021:
MIFTAHUDDIN YUSUP**

Tanda tangan.

92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Kemudian ini diumumkan di mana?

**93. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021:
MIFTAHUDDIN YUSUP**

Di kantor KPU dan (...)

94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di papan pengumuman, gitu ya?

**95. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021:
MIFTAHUDDIN YUSUP**

Ya, di papan pengumuman.

96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Langsung dilakukan pengumumannya di papan pengumuman?

**97. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021:
MIFTAHUDDIN YUSUP**

Langsung dilakukan serentak.

98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, jam berapa itu di papannya itu?

**99. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021:
MIFTAHUDDIN YUSUP**

Di papan ... papan pengumuman kantor KPU sekitar pukul 03.00
WIT (...)

100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pukul 03.00 WIT dini hari, ya?

**101. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021:
MIFTAHUDDIN YUSUP**

Ya, dini hari.

102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Enggak tidur berarti kalian, ya?

**103. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021:
MIFTAHUDDIN YUSUP**

Ya.

104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pada waktu itu, ya? Pukul 03.00 WIT langsung diumumkan. Ada ininya ... ada su ... apa ... su ... seperti nomor pengumuman nomor berapa, putusan berapa, itu ada?

**105. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021:
MIFTAHUDDIN YUSUP**

Ya kalau (...)

106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Hasilnya (...)

**107. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021:
MIFTAHUDDIN YUSUP**

Kalau keputusan, Nomor 136 terus nomor pengumumannya saya kurang ingat.

108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Ada itunya, ya?

109. MIFTAHUDDIN YUSUP

Siap, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada nomor sekian pengumuman hasil rekapitulasi, ya?

**111. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021:
MIFTAHUDDIN YUSUP**

Ada.

112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, diunggah di laman websitenya KPU?

113. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUDDIN YUSUP

Ya, langsung diunggah juga. Karena pada saat pleno rekapitulasi langsung ditayangkan oleh live streaming KPU juga dan bisa disaksikan oleh publik.

114. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Di lamannya itu diunggah (...)

115. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUDDIN YUSUP

Ya.

116. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

jam berapa?

117. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUDDIN YUSUP

Diunggah langsung sebentar setelah di ... pada saat (...)

118. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pukul 03.00 WITA dini hari juga?

119. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUDDIN YUSUP

Ya.

120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pukul 03.00 WITA dini hari, hari itu juga, ya?

**121. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021:
MIFTAHUDDIN YUSUP**

Hari itu juga tanggal 17.

122. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Ya, jadi ini sudah dilakukan, ya, sesuai dengan tahapan (...)

**123. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021:
MIFTAHUDDIN YUSUP**

Ya.

124. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di dalam PKPU, gitu, ya (...)

**125. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021:
MIFTAHUDDIN YUSUP**

PKPU Nomor 5, ya.

126. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kemudian berikutnya saya juga perlu klarifikasi soal bukti. Ini kan kalau kita lihat dalil Pemohon, ini ada desa ... Kecamatan Jailolo, Jailolo Selatan, Ibu ... Ibu Utara memang ini, ya?

**127. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021:
MIFTAHUDDIN YUSUP**

Ya, benar, Yang Mulia.

128. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Utara ... Ibu, Ibu Selatan, Sahu, dan Loloda, ya?

**129. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021:
MIFTAHUDDIN YUSUP**

Ya.

130. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini ada beberapa desa yang mereka dalilkan di sini. Ini bukti yang diajukan oleh Pemohon itu adalah Bukti C, ya?

131. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUDDIN YUSUP

Ya.

132. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, dari Termohon ini mengajukan bukti apa ini? Untuk menunjukkan bahwa berapa sebetulnya jumlah DPT-nya dan kemudian pengguna hak pilih itu?

133. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUDDIN YUSUP

Ya. Dari bukti Termohon, C ... ada C.Hasil.

134. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya?

135. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUDDIN YUSUP

Ada D.Hasil dan (...)

136. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

D.Hasil?

137. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUDDIN YUSUP

Ya, tiga kecamatan (...)

138. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

D hasil. Karena di sini saya mencari buktinya memang ada ... sebentar, saya buka dulu, ya. Supaya bisa di-cross-check-an itu nanti karena ada bukti yang ditaruh di akhir apakah T ... misalnya ini, di

halaman 17, ya. Apakah T-7, T-12 itu ... itu juga me ... bisa membuktikan untuk TPS 1, TPS 2, TPS 4, misalnya begitu.

139. TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUDDIN YUSUP

Bisa, Yang Mulia.

140. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini kan di akhir hanya partisipasi pemilih saja yang dimunculkan di situ.

141. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Izin, Yang Mulia.

142. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan!

143. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya. Bukti T-7 itu Form D.Hasil Kecamatan, Yang Mulia.

144. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

145. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Bukti T-12, T-13, T-14 itu Form C.Hasil, Yang Mulia. Beserta dengan Form C.Daftar Hadir Pemilih (...)

146. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang untuk melihat berapa DPTb dan DPT-nya?

147. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Itu di T-12 dan T-7 bisa, Yang Mulia. Karena T-7 itu merekapitulasi seluruh TPS di Kecamatan Jailolo (...)

148. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah rekapitulasi seluruhnya?

149. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Itu untuk kecamatan, Yang Mulia, kalau untuk T-12, T-13, T-14, itu untuk Form C.Hasil tingkat TPS.

150. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, ini sudah bisa, kemudian dari seluruh yang disampaikan Termohon T berapa, T berapa itu sudah bisa kemudian dilihat terkait dengan dalil Pemohon di Desa Guaemaadu dan seterusnya itu (...)

151. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Benar, Yang Mulia.

152. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Per TPS-nya.

153. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Benar, Yang Mulia.

154. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dengan bukti itu?

155. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Benar, Yang Mulia.

156. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi kan, buktinya kan di paling bawah sendiri. Jadi, itu sudah mencakup (...)

157. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Benar, Yang Mulia.

158. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Seluruhnya?

159. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Benar, Yang Mulia.

160. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

161. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Izin, Yang Mulia.

162. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

163. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Bukti itu sengaja Termohon taruh seperti itu juga untuk menjelaskan bahwa tidak ada perubahan perolehan suara dalam penghitungan di tingkat TPS dan rekapitulasi tingkat kecamatan hingga kabupaten, Yang Mulia.

164. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Kemudian per-TPS ini buktinya ada? Yang mereka kemudian tanda tangan semua?

165. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ada, Yang Mulia.

166. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Semua tanda tangan?

167. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Tanda tangan, Yang Mulia.

168. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Untuk TPS itu?

169. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Siap, Yang Mulia. Karena (...)

170. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Keberatannya enggak ada?

171. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Tidak ada, Yang Mulia. Karena proses pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Halmahera Barat itu berjalan dengan aman, tertib, Yang Mulia, sesuai dengan norma yang berlaku.

172. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Keberatannya mulai di mana ada?

173. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Keberatan, Yang Mulia, di kecamatan, Yang Mulia.

174. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di kecamatan. Di kecamatan keberatannya untuk bukti yang mana itu? Bukti berapa?

175. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Untuk bukti T-15.

176. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukti T-15. Di ... dimana itu? Di kecamatan mana itu?

177. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Itu di ... di Kecamatan Jailolo, Yang Mulia. TPS 4 Soakonora.

178. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jailolo, ya?

179. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya.

180. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jailolo. Baik. Kemudian, itu tadi sudah, ya, keberatan sudah. Kemudian untuk Pihak Terkait ini memang tidak langsung disebutkan di dalam keterangannya, misalnya ini merujuk kepada bukti PT berapa, PT berapa, ya? Karena ini saya lihat enggak ada rujukannya, kurung misalnya bukti PT berapa itu, enggak ada?

181. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: AH. WAKIL KAMAL

Ya, ya, Yang Mulia. Tapi di daftar (...)

182. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Buka ini, dibuka, Mas! Face shield-nya, suaranya nanti ketutupan.

**183. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
108/PHP.BUP-XIX/2021: AH. WAKIL KAMAL**

Ya, Yang Mulia. Karena sudah ada di daftar bukti (...)

184. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Begini, ya, karena ini kan harus mudah membacanya.

**185. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
108/PHP.BUP-XIX/2021: AH. WAKIL KAMAL**

Ya.

186. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nanti daftar buktinya itu harus jelas di halaman berapa, begitu.

**187. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
108/PHP.BUP-XIX/2021: AH. WAKIL KAMAL**

Ya, Yang Mulia.

188. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi jangan kita ... waktu kita dengan speedy trial ini buka-buka kelamaan nanti di situ, ya. Karena tidak ada rujukan langsung di keterangan yang disampaikan Pihak Terkait, ya.

**189. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
108/PHP.BUP-XIX/2021: AH. WAKIL KAMAL**

Ya, Yang Mulia.

190. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Kemudian, ini PSU-nya ini memang ya Bawaslu, ya? Hanya di Desa Moiso?

191. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA BARAT: AKNOSIUS DATANG

Ya, Yang Mulia.

192. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Desa Moiso.

193. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA BARAT: AKNOSIUS DATANG

Ya.

194. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Untuk desa yang didalilkan itu ndak pernah ... tidak ada PSU?

195. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA BARAT: AKNOSIUS DATANG

Tidak ada, Yang Mulia.

196. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada sama sekali PSU-nya, ya?

197. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA BARAT: AKONOSIUS DATANG

Ya.

198. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Kemudian dari saya. Saya kira itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

199. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada. Yang Mulia, Pak Wahid, silakan!

200. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, untuk klarifikasi terutama untuk ke Termohon, ya. Karena ini dipersoalkan nama desa. Di Pemohon itu yang dipersoalkan itu di Kecamatan Jailolo Selatan itu nama desanya Gam TPS 07. Sementara di ... apa ... jawaban dari Termohon, juga Pihak terkait, dan juga Bawaslu menyebut desa itu Sidangoli Gam. Sidangoli itu ada 2, ya, di Jailolo Selatan, Sidangoli Dehe, yang dipersoalkan TPS 01, dia ada buktinya. Kemudian, di Jailolo Selatan itu ada nama desa menurut Pemohon itu nama Desanya Gam tertulis di permohonan dan diperbaiki. Tapi di

Pihak Terkait ... di Termohon dan di Bawaslu itu nama Desanya Sidangoli Gam. Saya ini minta kepastian dari Termohon, ini kan dari KPU-nya, yang benar itu hanya Gam saja atau Sidangoli Gam, yang dipersoalkan di TPS 07 itu?

201. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Te ... terima kasih, Yang Mulia. Izin Kuasa Hukum Termohon. Pada awalnya memang, Yang Mulia, ketika membaca permohonan, kami hanya menemukan nama desa disebut Gam. Jawabannya itu awalnya disiapkan bahwa tidak ada nama Desa Gam disitu, Yang Mulia. Tapi kemarin kalau tidak salah, saat sidang pendahuluan dan mendengarkan permohonan Pemohon, sudah direnvoi, Yang Mulia, makanya jawabannya sudah kami sesuaikan. Nama yang benar itu Sidangoli Gam, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

202. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ini sebetulnya ya, nama desa ... apa itu ... ya, tidak bisa karena itu bukan hanya soal ... ini ... tapi itu makanya kita konfirmasi ke Termohon, ya. Kalau dari Pemohon, tidak dapat direnvoi hal-hal demikian karena itu bukan hanya salah a, b, c, tapi nama desa kan. Karena bisa saja ada Gam saja, ada Sidangoli Gam. Karena di (ucapan tidak terdengar jelas) ... ada Sidangoli Dehe. Tapi dari Terkait, dari Termohon, dan dari Bawaslu ini dijawabnya Sidangoli Gam. Jadi, berarti Sidangoli Gam ya, supaya ini ... apa ... sinkron. Artinya kan bisa kita klarifikasi, nanti kita lihat di buktinya dan di nama desa itu, ya. Ya itu saja, terima kasih.

203. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Selanjutnya pengesahan alat bukti. Termohon mengajukan T-1 sampai dengan T-64, Termohon? Benar?

204. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Benar, Yang Mulia.

205. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah!

KETUK PALU 1X

PT-1 sampai dengan PT-63 untuk Pihak Terkait, benar?

206. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: FREIZER GIWE

Benar, Yang Mulia.

207. KETUA: ANWAR USMAN

Dinyatakan sah!

KETUK PALU 1X

Kemudian, Bawaslu mengajukan PK-1 sampai dengan PK-103, benar?

208. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA BARAT: AKONOSIUS DATANG

Benar, Yang Mulia.

209. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah!

KETUK PALU 1X

Dengan catatan untuk Termohon, bukti T-63 angka 1 tidak sesuai antara daftar alat bukti dan alat buktinya. Nanti dikonfirmasi ke Kepaniteraan.

210. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Baik, Yang Mulia.

211. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dengan demikian sidang untuk perkara ini telah selesai dan hasilnya akan dilaporkan ke RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim).

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL DAVID

Yang Mulia (...)

213. KETUA: ANWAR USMAN

Lalu untuk sidang selanjutnya (...)

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL DAVID

Mohon izin, Yang Mulia.

215. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL DAVID

Pemohon, Yang Mulia. Ada bukti tambahan, Yang Mulia.

217. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, baik baik, betul. Sebentar, sidang lanjutan nanti nunggu pemberitahuan dari kepaniteraan. Kemudian Bukti Tambahan dari Pemohon P-61, P-109, sampai dengan P-113, benar?

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021: SAMUEL DAVID

Betul, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

219. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah!

KETUK PALU 1X

Jadi, sudah klir semua. Sekali lagi untuk sidang selanjutnya tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 08.53 WIB

Jakarta, 5 Februari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

